

# TREN ANGKA PARTISIPASI PENDIDIKAN MENENGAH DAN PERENCANAAN KEBIJAKAN PARTISIPASI PENDIDIKAN DI PROVINSI JAWA TENGAH

## *TRENDS OF MIDDLE EDUCATION PARTICIPATION RATE AND EDUCATION PARTICIPATION POLICY PLANNING IN CENTRAL JAVA PROVINCE*

Oleh: Rob Fiana, Universitas Negeri Yogyakarta  
[robiana.2017@student.uny.ac.id](mailto:robiana.2017@student.uny.ac.id)

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prediksi ketercapaian APK/APM Pendidikan Menengah di kabupaten/kota dan Provinsi Jawa Tengah, mengidentifikasi kebijakan dan program Pemerintah Jawa Tengah dalam meningkatkan angka partisipasi pendidikan menengah, dan menganalisa kebijakan untuk meningkatkan angka partisipasi pendidikan menengah berdasarkan hasil prediksi APK/APM. Data kuantitatif dikumpulkan dari web Kemdikbud dan dianalisis menggunakan tren model kuadrat terkecil. Data kualitatif dikumpulkan dengan wawancara dan dianalisis menggunakan model interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa APK Pendidikan Menengah di Jawa Tengah diprediksi dapat mencapai target PMU 97% pada tahun 2025 dan diprediksi mencapai 97,957%, sedangkan APM hingga tahun 2030 belum bisa mencapai 100% dan diprediksi mencapai 84,624%. Tren APK/APM Pendidikan Menengah Kabupaten Temanggung, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Blora, dan Kabupaten Jepara menunjukkan peningkatan, sedangkan Kota Surakarta dan Kota Semarang mengalami penurunan. Pemerintah Jateng memberlakukan kebijakan untuk meningkatkan partisipasi Pendidikan Menengah yang terbagi dalam beberapa aspek yaitu operasional kelembagaan, personal siswa, peningkatan akses, dan mutu. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah menindaklanjuti hasil tren dengan cara mempertahankan dan meningkatkan partisipasi pendidikan menengah.

Kata kunci: tren, angka partisipasi, pendidikan menengah, rencana kebijakan.

### **Abstract**

*This study aims to determine the prediction of the achievement of GER/NER of Secondary Education in districts/cities and Provinces of Central Java, identify policies and programs of the Central Java Government in increasing secondary education enrollment rates, and analyze policies to increase secondary education enrollment rates based on the results of GER/NER predictions. Quantitative data were collected from the Ministry of Education and Culture's website and analyzed using the trend of least squares model. Qualitative data were collected by interview and analyzed using an interactive model. The results show that the GER for Secondary Education in Central Java is predicted to reach the Universal Secondary Education target of 97% in 2025 and is predicted to reach 97.957%, while the NER until 2030 cannot reach 100% and is predicted to reach 84.624%. The trend of GER/NER for Secondary Education in Temanggung Regency, Wonosobo Regency, Blora Regency, and Jepara Regency showed an increase, while Surakarta City and Semarang City experienced a decrease. The Central Java government enforces policies to increase secondary education participation which are divided into several aspects, namely institutional operations, student personalization, increased access, and quality. The Education and Culture Office of Central Java Province is following up on the trend results by maintaining and increasing secondary education participation.*

*Keywords: trend, enrollment rate, secondary education, policy plan.*

## PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan hal penting yang diperhatikan negara. Pendidikan merupakan cara formal untuk mencerdaskan warga yang dilakukan oleh negara. Modal pembangunan SDM juga tidak terlepas dengan pendidikan. Pembangunan nasional yang telah direncanakan akan mudah dicapai dengan pendidikan yang memadai. Hal pertama dapat dimulai dengan memberikan akses atau membuka kesempatan kepada warga untuk mengenyam dan mendapatkan hak pendidikannya karena warga negara berhak mendapatkan pelayanan pendidikan.

Upaya yang telah dilakukan pemerintah dalam peningkatan pemerataan dan perluasan akses pendidikan agar lulusan pendidikan dasar dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah yaitu dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2013 tentang Pendidikan Menengah Universal. Tujuan penyelenggaraan Pendidikan Menengah Universal yaitu untuk mempercepat pencapaian APK. Target capaian APK disebutkan dalam pasal 2 ayat 2 Permen No 80 Tahun 2013 yaitu capaian APK pendidikan menengah pada tahun 2020 sebesar 97%. Akan tetapi, target APK pendidikan menengah tahun 2020 tidak mudah untuk dicapai karena berdasarkan data dari Kemdikbud capaian APK di berbagai provinsi masih banyak yang di bawah capaian nasional.

Angka partisipasi pendidikan di suatu wilayah dapat diketahui dengan melihat indikator Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Kasar (APK), dan Angka Partisipasi Murni (APM). Perkembangan APK pendidikan

menengah di Indonesia dalam 9 tahun terakhir mengalami kenaikan mulai tahun 2014 ke 2015 hingga tahun 2019 sebesar 0,9 hingga 5, sepersekian persen sedangkan data APM menunjukkan bahwa dari tahun 2013 ke 2014 mengalami kenaikan hingga tahun 2019 sebesar 1, hingga 5, sepersekian persen (Sumber: Kemdikbud, 2020). Masih terdapat wilayah yang capaian APK dan APM pada jenjang pendidikan menengah dibawah dari APK APM nasional. Salah satunya yaitu Jawa Tengah. Angka Partisipasi Pendidikan Jenjang SMA/MA/Paket C dengan *Fuzzy Subtractive Clustering* menunjukkan bahwa cluster yang APK mencapai kriteria penuntasan wajib belajar hanya 7 kabupaten/kota yaitu cluster 3 (Kab. Klaten, Kab. Sukoharjo, Kota Magelang dan Kota Salatiga) yang nilai APK sekitar 85,59% dan cluster 4 (Kab. Purbalingga, Kab. Wonosobo dan Kab. Batang) yang nilai APK sekitar 43,86%. Sedangkan 28 kabupaten/kota lainnya belum mencapai kriteria (Hitasari dkk, 2015: 975).

Berdasarkan data Kemendikbud dan Kemenag, capaian APK dan APM di Provinsi Jawa Tengah menunjukkan fluktuatif dan masih di bawah capaian nasional. Capaian APK APM pendidikan menengah di Provinsi Jawa Tengah yang menunjukkan angka lebih tinggi nasional hanya pada tahun 2013 dengan presentase APK lebih tinggi sebesar 3,81% dan APM lebih tinggi sebesar 4% serta tahun 2014 dengan persentase APK lebih tinggi sebesar 3,79% dan APM lebih tinggi sebesar 2,83%. Rendahnya capaian APK APM pendidikan menengah di Jawa Tengah disebabkan oleh banyaknya Kabupaten/kota masih berada di bawah capaian nasional. Provinsi Jawa Tengah secara administratif terbagi menjadi 35

kabupaten/kota yaitu 29 kabupaten dan 6 kota dengan karakteristik yang berbeda. Hanya 16 kabupaten/kota yang capaian APK dan APM di atas capaian nasional, sedangkan 19 Kabupaten/kota lainnya masih berada dibawah capaian nasional (Kemdikbud, 2020). Berdasarkan Dokumen Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2023 rendahnya APK salah satunya disebabkan oleh faktor ekonomi sehingga lulusan SMP/MTs tidak mampu melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi sehingga lebih memilih untuk bekerja.

Dibandingkan dengan target pemerintah yang disebutkan dalam dalam pasal 2 ayat 2 Permen No 80 Tahun 2013 yaitu capaian APK pendidikan menengah pada tahun 2020 sebesar 97%, belum ada 50% kabupaten/kota di Jawa Tengah pada tahun 2019 yang mencapai target. Tahun 2019 terdapat 31,429% atau 11 kabupaten/kota yang mencapai target, sedangkan 68,571% atau 24 kabupaten/kota belum mencapai target. Sebelas kabupaten/kota yang memenuhi target 97% sebagai berikut:

Tabel 1. Capaian APK Pendidikan Menengah kabupaten/kota tahun 2019

No.	Kabupaten/Kota	APK (%)
1	Kab. Banyumas	101,30
2	Kab. Klaten	97,03
3	Kab. Sragen	97,13
4	Kab. Grobogan	97,73
5	Kab. Blora	98,09
6	Kab. Rembang	98,00
7	Kab. Pati	97,03
8	Kab. Kudus	100,39
9	Kab. Kendal	97,79
10	Kota Surakarta	104,05
11	Kota Tegal	99,81

Sumber: Kemdikbud, 2020

Melihat jumlah kabupaten/kota yang capaian APK sudah mencapai target belum ada 50%, maka pemerintah sebaiknya melakukan perencanaan agar capaian kabupaten/kota dapat mencapai target. Salah satu cara untuk mengetahui kondisi di masa depan yaitu dengan melakukan peramalan dengan analisis tren. Hasil perhitungan analisis tren dapat digunakan sebagai acuan dalam perencanaan dan percepatan pencapaian target APK yang telah ditentukan, karena setelah perhitungan dapat diketahui tahun berapa kabupaten/kota akan mencapai target sesuai yang telah dibuat. Oleh karena itu, pemerintah dapat melakukan upaya-upaya untuk perencanaan dan percepatan pencapaian target APK/APM.

Pemerintah Jawa Tengah telah melakukan upaya untuk meningkatkan angka partisipasi pendidikan menengah. Salah satu kebijakan terbaru yang diterapkan yaitu menggratiskan SPP untuk pendidikan menengah (SMA/SMK/SLB) negeri (Humas Jateng, 2020). Tujuannya untuk meningkatkan angka partisipasi sekolah dan mengurangi angka putus sekolah serta memberikan akses pemerataan pendidikan di Jawa Tengah.

Capaian APK/APM pendidikan menengah di Jawa Tengah masih di bawah capaian nasional maka perlu dilakukan perencanaan kebijakan dalam meningkatkan partisipasi pendidikan. Data capaian APK dan APM yang ada saat ini dapat digunakan untuk membuat prediksi kondisi APK dan APM di masa yang akan datang. Hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penentuan kebijakan pendidikan menengah di Provinsi Jawa Tengah. Sejauh pengamatan penulis, penelitian pendidikan dengan analisis tren masih jarang dilakukan terutama di Jawa Tengah. Oleh karena itu, penelitian ini mengulas

tentang “Tren Angka Partisipasi Pendidikan Menengah dan Perencanaan Kebijakan Partisipasi Pendidikan Provinsi Jawa Tengah”. Berdasarkan uraian di atas, tulisan ini bertujuan untuk 1) mengetahui prediksi ketercapaian APK/APM Pendidikan Menengah di tingkat kabupaten/kota dan Provinsi Jawa Tengah, 2) mengidentifikasi kebijakan dan program yang diberlakukan oleh Pemerintah Jawa Tengah dalam meningkatkan angka partisipasi pendidikan menengah, dan 3) menganalisa kebijakan berdasarkan hasil prediksi APK/APM untuk meningkatkan angka partisipasi pendidikan menengah.

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode campuran atau *mixed method eksplanatoris sekuensial*. Penelitian kuantitatif digunakan untuk mendapat informasi capaian tren APK APM Pendidikan Menengah di Provinsi Jawa Tengah. Setelah mendapatkan data tersebut, dilanjutkan dengan metode penelitian kualitatif dengan tujuan untuk melakukan eksplorasi lebih dalam terhadap perencanaan kebijakan partisipasi pendidikan menengah di Provinsi Jawa Tengah.

### **Waktu dan Tempat Penelitian**

Waktu penelitian yaitu April-Juni 2021. Tempat penelitian ini berlokasi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Tengah dan beberapa Kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.

### **Populasi dan Sampel**

Populasi dalam penelitian ini adalah Provinsi Jawa Tengah. Pemilihan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *cluster sampling* lalu menggunakan *simple random sampling*. Dari tabel

*cluster* Kabupaten/kota, sampel yang digunakan berdasarkan teknik *simple random sampling* yaitu Kota Surakarta, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Jepara, Kabupaten Wonosobo, Kota Semarang, dan Kabupaten Blora.

### **Teknik Pengumpulan Data**

#### **1. Data Sekunder**

Data sekunder digunakan untuk mengumpulkan data dengan metode kuantitatif. Data sekunder yang digunakan yaitu capaian APK APM Sekolah Menengah di Provinsi Jawa Tengah dan beberapa Kabupaten yang telah dipilih sebagai sampel. Data diambil dari web Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (<http://apkapm.data.kemdikbud.go.id>) ataupun Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Tengah.

#### **2. Wawancara**

Wawancara digunakan dalam mengumpulkan data dengan metode kualitatif. Metode wawancara digunakan untuk mendukung data-data yang telah diperoleh untuk melengkapi hasil analisis data kuantitatif. Proses wawancara dilakukan dengan narasumber yaitu bagian Subbagian Program Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Tengah. Peneliti melakukan wawancara dengan Subbagian Program yaitu Kasubag serta Penyusun Laporan dan Program karena narasumber tersebut yang berkompeten dalam perencanaan dan penyusunan program. Sebelum melakukan wawancara dibuat instrumen penelitian terlebih dahulu. Instrumen penelitian yang dibuat berupa pedoman wawancara berisi daftar pertanyaan mengenai kebijakan dan program Pemerintah Jawa Tengah

dalam meningkatkan angka partisipasi pendidikan menengah.

### Teknik Analisis Data

#### 1. Analisis Tren

Analisis tren digunakan untuk menganalisis data kuantitatif. Metode tren yang digunakan adalah metode kuadrat terkecil (*least square method*). Persamaan garis linier dengan metode kuadrat terkecil (*least square method*) berdasarkan Wiliiam N Dunn (2003: 315) adalah  $Y=a+bX$ .

Dimana :

$Y$  = Data berkala atau nilai tren untuk periode tertentu

$a$  = Konstanta

$b$  = Koefisien regresi (rata-rata pertumbuhan nilai tren tiap tahun)

$x$  = Periode waktu (hari, minggu, bulan atau tahun)

Ciri dari metode *least square* yaitu dalam menentukan parameter  $X$  harus berjumlah 0. Saat perhitungan diperlukan nilai tertentu pada variabel waktu ( $x$ ) sehingga jumlah nilai variabel waktu adalah nol atau  $\sum X = 0$ . Penelitian ini menggunakan data dengan jumlah tahun ganjil yaitu capaian APK/APM tahun 2011-2019, maka  $x$  dalam penelitian ini menggunakan skala  $x= 1$  tahun.

#### 2. Model Interaktif

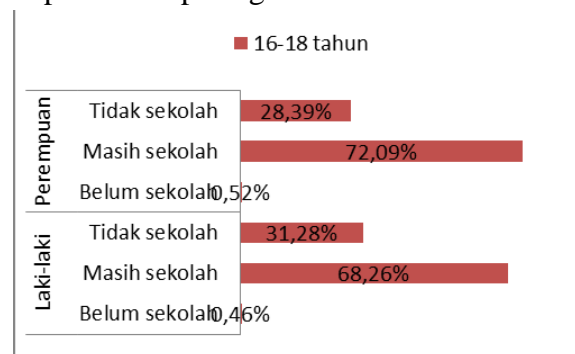
Model Interaktif digunakan untuk menganalisis data kualitatif. Analisis data menurut Miles and Huberman dalam (Sugiyono, 2020: 332) dengan model interaktif yaitu: data *collection* (pengumpulan data), data *condensation* (kondensasi data), data *display* (penyajian data), dan *concluding drawing/verification* (penarikan kesimpulan).

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini didasarkan pada hasil perhitungan analisis tren APK/APM dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti di Subbagian Program Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah. Penelitian ini membahas prediksi APK APM Pendidikan Menengah di Jawa Tengah dan kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah, kebijakan dan program yang diberlakukan oleh Pemerintah Jawa Tengah dalam meningkatkan angka partisipasi pendidikan menengah, serta perencanaan kebijakan yang dapat dilakukan Pemerintah Jawa Tengah berdasarkan hasil prediksi APK APM untuk meningkatkan angka partisipasi pendidikan menengah.

### Profil Provinsi Jawa Tengah

Data BPS menunjukkan penduduk Provinsi Jawa Tengah berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2019 sebanyak 34.718.2014 jiwa yang terdiri atas 17.212.455 ribu jiwa penduduk laki-laki dan 17.505.749 jiwa penduduk perempuan (BPS, 2020). Penduduk usia sekolah pada jenjang pendidikan menengah 16-18 tahun dapat dilihat pada grafik berikut:

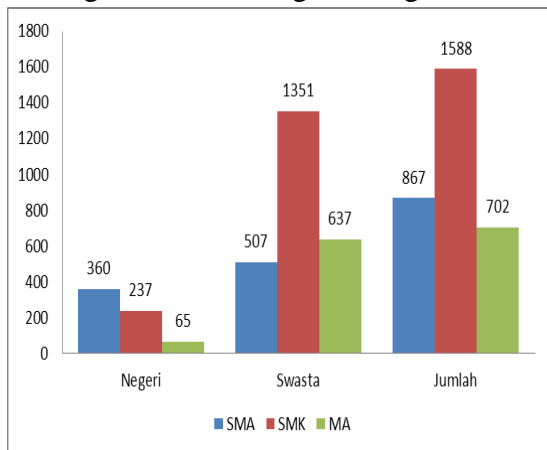


Gambar 1. Grafik Penduduk Usia Pendidikan Menengah

Sumber data: BPS, 2020

Berdasarkan grafik di atas, dapat diketahui bahwa penduduk usia 16-18 tahun laki-laki terdapat 0,46% belum sekolah, 68,26%

masih sekolah, dan 31,28% tidak sekolah. Penduduk usia 16-18 tahun perempuan terdapat 0,52% belum sekolah, 72,09% masih sekolah, dan 28,39% tidak sekolah. Jumlah siswa SMA/SMK di Jawa Tengah tahun 2019 berjumlah 1.213.967 dengan rincian laki-laki di SMA/SMK yaitu 625.042, sedangkan jumlah siswa perempuan berjumlah 588.925. Jumlah sekolah formal jenjang pendidikan menengah di Jawa Tengah sebagai berikut:



Gambar 2. Diagram Jumlah Sekolah SMA/SMK/MA  
Sumber data: BPS, 2020

Berdasarkan grafik di atas, dapat diketahui SMA di Jawa Tengah berjumlah 867 sekolah dengan rincian 360 sekolah negeri dan 507 sekolah swasta. SMK berjumlah 1588 sekolah dengan rincian 237 sekolah negeri dan 1351 sekolah swasta. MA berjumlah 702 dengan rincian 65 negeri dan 637 swasta.

### Tren Angka Partisipasi Pendidikan Menengah di Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan data dari Kemdikbud, dilakukan prediksi dengan mencari tren APK APM pendidikan menengah Jawa Tengah dengan menggunakan analisis tren linier metode kuadrat terkecil dengan persamaan  $Y=a+bX$  dimana:  
a = Konstanta

b = Koefisien regresi (rata-rata pertumbuhan nilai tren tiap bulan)

APK

$$a = \frac{\sum Y}{n} = \frac{709,71}{9} = 78,857$$

$$b = \frac{\sum XY}{\sum X^2} = \frac{109,21}{60} = 1,820$$

APM

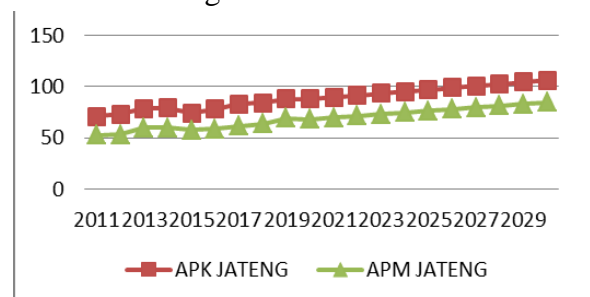
$$a = \frac{\sum Y}{n} = \frac{537,38}{9} = 59,709$$

$$b = \frac{\sum XY}{\sum X^2} = \frac{99,68}{60} = 1,661$$

X = Periode waktu (tahun)

Penelitian ini menggunakan data capaian APK/APM tahun 2011-2019, maka x menggunakan skala x= 1 tahun karena jumlah tahun ganjil.

Berdasarkan perhitungan tersebut, persamaan tren APK pendidikan menengah Jawa Tengah yaitu  $Y'=78,857+1,820X$  dan persamaan APM pendidikan menengah Jawa Tengah yaitu  $Y'=59,709+1,661X$ . Berikut grafik tren angka partisipasi pendidikan menengah berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan sebagai berikut:



Gambar 3. Grafik perhitungan Tren APK/APM Pendidikan Menengah di Jawa Tengah

Berdasarkan grafik di atas dapat diketahui bahwa prediksi APK dan APM mulai tahun 2020 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Garis tren APK dan APM mulai tahun 2020 disebut garis tren positif karena memiliki kecenderungan naik

setiap tahunnya. Garis tren APK pendidikan menengah Provinsi Jawa Tengah menunjukkan mengalami peningkatan sebesar 1,82% setiap tahunnya. Sedangkan untuk garis tren APM pendidikan menengah menunjukkan mengalami peningkatan sebesar 1,661% setiap tahunnya. Dibandingkan dengan target pemerintah yang disebutkan dalam pasal 2 ayat 2 Permen No 80 Tahun 2013 yaitu capaian APK pendidikan menengah pada tahun 2020 sebesar 97%, maka Provinsi Jawa Tengah dilihat dari hasil grafik tren akan mencapai target pada tahun 2025 sebesar 97,057%. Capaian APM setiap tahunnya meningkat, hal ini menunjukkan bahwa anak yang menempuh pendidikan menengah semakin sesuai dengan umur yang telah ditentukan yaitu 16 (enam belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun.

### Tren Angka Partisipasi Pendidikan Menengah Kota Surakarta

Berdasarkan data dari Kemdikbud, dilakukan prediksi dengan mencari tren APK APM pendidikan menengah Kota Surakarta dengan menggunakan analisis tren linier metode kuadrat terkecil dengan persamaan  $Y = a + bX$  dimana:

APK

$$a = \frac{\sum Y}{n} = \frac{1003,24}{9} = 111,471$$

$$b = \frac{\sum XY}{\sum X^2} = \frac{-301,24}{60} = -5,021$$

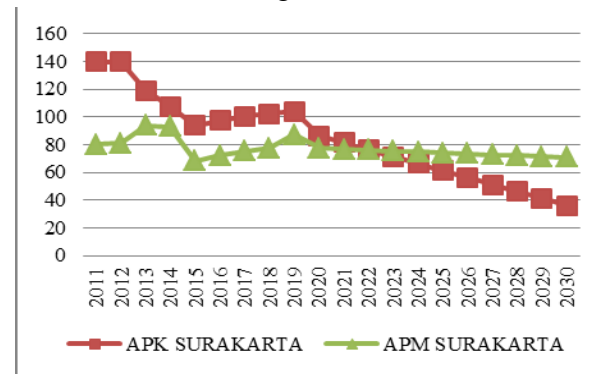
APM

$$a = \frac{\sum Y}{n} = \frac{727,81}{9} = 80,868$$

$$b = \frac{\sum XY}{\sum X^2} = \frac{-40,75}{60} = -0,679$$

Berdasarkan perhitungan tersebut, persamaan tren APK pendidikan menengah Kota Surakarta yaitu

$Y' = 111,471 + (-5,021)X$  dan persamaan APM pendidikan menengah Kota Surakarta yaitu  $Y' = 80,868 + (-0,679)X$ . Berikut grafik tren angka partisipasi pendidikan menengah berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan sebagai berikut:



Gambar 4. Perhitungan Tren APK/APM Pendidikan Menengah di Kota Surakarta

Berdasarkan grafik di atas dapat diketahui bahwa prediksi APK dan APM mulai tahun 2020 mengalami penurunan setiap tahunnya. Garis tren APK dan APM mulai tahun 2020 disebut garis tren negatif karena memiliki kecenderungan turun setiap tahunnya. Garis tren APK pendidikan menengah Kota Surakarta menunjukkan mengalami penurunan sebesar 5,021% setiap tahunnya. Garis tren APM pendidikan menengah menunjukkan mengalami penurunan 0,679% setiap tahunnya. Dibandingkan dengan target pemerintah yang disebutkan dalam pasal 2 ayat 2 Permen No 80 Tahun 2013 yaitu capaian APK pendidikan menengah pada tahun 2020 sebesar 97%, maka Kota Surakarta dilihat dari hasil grafik tren pada tahun 2016 hingga tahun 2019 sudah mencapai target. Akan tetapi, hasil tren mulai tahun 2020 Kota Surakarta mengalami penurunan setiap tahunnya. Hasil perhitungan dengan analisis tren Kota Surakarta mengalami penurunan



setiap tahunnya karena pada tahun 2012 hingga tahun 2015 capaian APK mengalami penurunan yang signifikan. APM pada tahun 2013 hingga tahun 2015 mengalami penurunan setiap tahunnya sehingga hasil perhitungan tren juga mengalami penurunan. Oleh karena itu, pemerintah harus menjaga capaian APK dan APM agar penurunan yang signifikan tidak terulang kembali.

### Tren Angka Partisipasi Pendidikan Menengah di Kabupaten Temanggung

Berdasarkan data dari Kemdikbud, dilakukan prediksi dengan mencari tren APK APM pendidikan menengah Kabupaten Temanggung dengan menggunakan analisis tren linier metode kuadrat terkecil dengan persamaan  $Y = a + bX$  dimana:

APK

$$a = \frac{\sum Y}{n} = \frac{654,12}{9} = 72,680$$

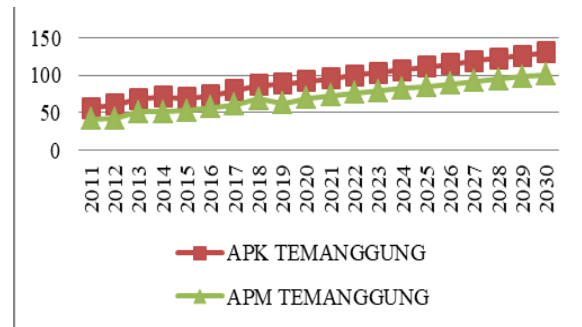
$$b = \frac{\sum XY}{\sum X^2} = \frac{229,81}{60} = 3,830$$

APM

$$a = \frac{\sum Y}{n} = \frac{487,16}{9} = 54,129$$

$$b = \frac{\sum XY}{\sum X^2} = \frac{187,41}{60} = 3,124$$

Berdasarkan perhitungan tersebut, persamaan tren APK pendidikan menengah Kabupaten Temanggung yaitu  $Y' = 72,680 + 3,830X$  dan persamaan APM pendidikan menengah Kabupaten Temanggung yaitu  $Y' = 54,129 + 3,124X$ . Berikut grafik tren angka partisipasi pendidikan menengah berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan sebagai berikut:



Gambar 5. Perhitungan Tren APK/APM Pendidikan Menengah di Kabupaten Temanggung

Berdasarkan grafik di atas dapat diketahui bahwa prediksi APK dan APM mulai tahun 2020 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Garis tren APK dan APM mulai tahun 2020 disebut garis tren positif karena memiliki kecenderungan naik setiap tahunnya. Garis tren APK pendidikan menengah Kabupaten Temanggung menunjukkan mengalami peningkatan sebesar 3,83% setiap tahunnya. Sedangkan untuk garis tren APM pendidikan menengah menunjukkan mengalami peningkatan sebesar 3,124% setiap tahunnya. Dibandingkan dengan target pemerintah yang disebutkan dalam pasal 2 ayat 2 Permen No 80 Tahun 2013 yaitu capaian APK pendidikan menengah pada tahun 2020 sebesar 97%, maka Kabupaten Temanggung dilihat dari hasil grafik tren akan mencapai target pada tahun 2022 sebesar 99,49%. Capaian APM setiap tahunnya meningkat, hal ini menunjukkan bahwa anak yang menempuh pendidikan menengah semakin sesuai dengan umur yang telah ditentukan yaitu 16 (enam belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun. Pada tahun 2030 APM pendidikan menengah diprediksi mencapai 100%, hal ini menunjukkan bahwa anak-anak yang mengenyam pendidikan menengah sudah sesuai dengan umur yang telah ditentukan.



### Tren Angka Partisipasi Pendidikan Menengah di Kabupaten Jepara

Berdasarkan data dari Kemdikbud, dilakukan prediksi dengan mencari tren APK APM pendidikan menengah Kabupaten Jepara dengan menggunakan analisis tren linier metode kuadrat terkecil dengan persamaan  $Y = a + bX$  dimana:  
APK

$$a = \frac{\sum Y}{n} = \frac{663,64}{9} = 73,738$$

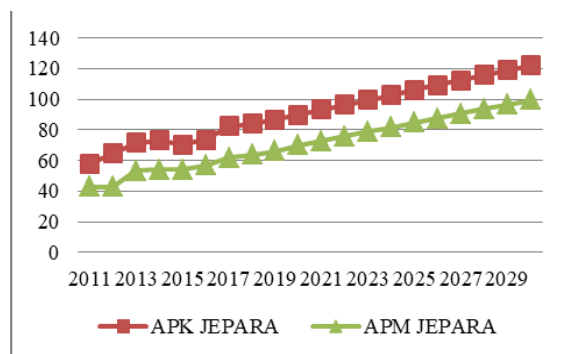
$$b = \frac{\sum XY}{\sum X^2} = \frac{193,32}{60} = 3,222$$

APM

$$a = \frac{\sum Y}{n} = \frac{495,51}{9} = 55,057$$

$$b = \frac{\sum XY}{\sum X^2} = \frac{177,55}{60} = 2,959$$

Berdasarkan perhitungan tersebut, persamaan tren APK pendidikan menengah Kabupaten Jepara yaitu  $Y' = 73,738 + 3,222X$  dan persamaan APM pendidikan menengah Kabupaten Jepara yaitu  $Y' = 55,057 + 2,959X$ . Berikut grafik tren angka partisipasi pendidikan menengah berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan sebagai berikut:



Gambar 6. Grafik Perhitungan Tren APK/APM Pendidikan Menengah di Kabupaten Jepara

Berdasarkan grafik di atas dapat diketahui bahwa prediksi APK dan APM mulai tahun 2020 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Garis tren APK dan APM mulai tahun 2020 disebut garis tren positif karena memiliki kecenderungan naik setiap tahunnya. Garis tren APK pendidikan menengah Kabupaten Jepara menunjukkan mengalami peningkatan sebesar 3,222% setiap tahunnya. Sedangkan untuk garis tren APM pendidikan menengah Kabupaten Jepara menunjukkan mengalami peningkatan sebesar 2,959% setiap tahunnya. Dibandingkan dengan target pemerintah yang disebutkan dalam pasal 2 ayat 2 Permen No 80 Tahun 2013 yaitu capaian APK pendidikan menengah pada tahun 2020 sebesar 97%, maka Kabupaten Jepara dilihat dari hasil grafik tren akan mencapai target pada tahun 2023 sebesar 99,514%. Capaian APM setiap tahunnya meningkat, hal ini menunjukkan bahwa anak yang menempuh pendidikan menengah semakin sesuai dengan umur yang telah ditentukan yaitu 16 (enam belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun. Pada tahun 2030 APM pendidikan menengah diprediksi mencapai 99,442%, hal ini menunjukkan bahwa anak-anak yang mengenyam pendidikan menengah hampir sudah sesuai dengan umur yang telah ditentukan.

### Tren Angka Partisipasi Pendidikan Menengah di Kabupaten Wonosobo

Berdasarkan data dari Kemdikbud, dilakukan prediksi dengan mencari tren APK APM pendidikan menengah Kabupaten Wonosobo dengan menggunakan analisis tren linier metode kuadrat terkecil dengan persamaan  $Y = a + bX$  dimana:

APK

$$a = \frac{\sum Y}{n} = \frac{637,98}{9} = 70,887$$

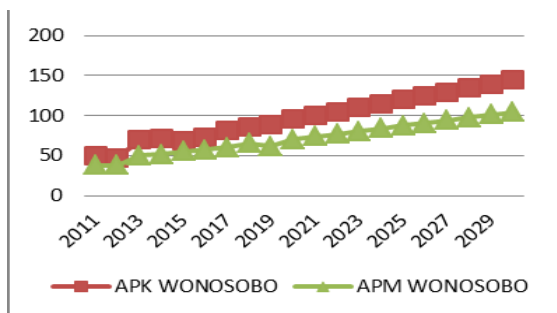
$$b = \frac{\sum XY}{\sum X^2} = \frac{293,17}{60} = 4,886$$

APM

$$a = \frac{\sum Y}{n} = \frac{480,32}{9} = 53,369$$

$$b = \frac{\sum XY}{\sum X^2} = \frac{204,57}{60} = 3,410$$

Berdasarkan perhitungan tersebut, persamaan tren APK pendidikan menengah Kabupaten Wonosobo yaitu  $Y' = 70,887 + 4,886X$  dan persamaan APM pendidikan menengah Kabupaten Wonosobo yaitu  $Y' = 53,369 + 3,410X$ . Berikut grafik tren angka partisipasi pendidikan menengah berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan sebagai berikut:



Gambar 7. Grafik Perhitungan Tren APK/APM Pendidikan Menengah di Kabupaten Wonosobo

Berdasarkan grafik di atas, dapat diketahui bahwa prediksi APK dan APM mulai tahun 2020 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Garis tren APK dan APM mulai tahun 2020 disebut garis tren positif karena memiliki kecenderungan naik setiap tahunnya. Garis tren APK pendidikan menengah Kabupaten Wonosobo menunjukkan mengalami peningkatan sebesar 4,886% setiap tahunnya. Sedangkan untuk garis tren APM pendidikan menengah Kabupaten

Wonosobo menunjukkan mengalami peningkatan sebesar 3,41% setiap tahunnya. Dibandingkan dengan target pemerintah yang disebutkan dalam pasal 2 ayat 2 Permen No 80 Tahun 2013 yaitu capaian APK pendidikan menengah pada tahun 2020 sebesar 97%, maka Kabupaten Wonosobo dilihat dari hasil grafik tren akan mencapai target pada tahun 2021 sebesar 100,203%. Capaian APM setiap tahunnya meningkat, hal ini menunjukkan bahwa anak yang menempuh pendidikan menengah semakin sesuai dengan umur yang telah ditentukan yaitu 16 (enam belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun. Pada tahun 2029 APM pendidikan menengah diprediksi mencapai 101,109%, hal ini menunjukkan bahwa anak-anak yang mengenyam pendidikan menengah sudah sesuai dengan umur yang telah ditentukan.

### Tren Angka Partisipasi Pendidikan Menengah di Kota Semarang

Berdasarkan data dari Kemdikbud, dilakukan prediksi dengan mencari tren APK APM pendidikan menengah Kota Semarang dengan menggunakan analisis tren linier metode kuadrat terkecil dengan persamaan  $Y = a + bX$  dimana:

APK

$$a = \frac{\sum Y}{n} = \frac{824,4}{9} = 91,600$$

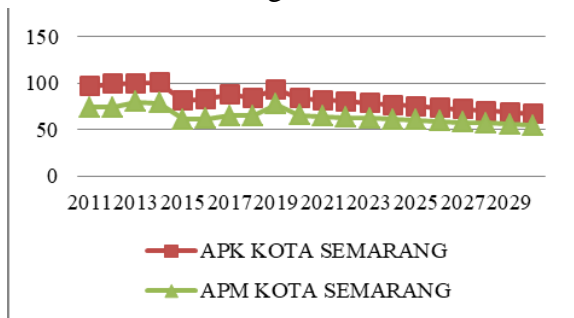
$$b = \frac{\sum XY}{\sum X^2} = \frac{-99,23}{60} = -1,654$$

APM

$$a = \frac{\sum Y}{n} = \frac{634}{9} = 70,444$$

$$b = \frac{\sum XY}{\sum X^2} = \frac{-62,92}{60} = -1,049$$

Berdasarkan perhitungan tersebut, persamaan tren APK pendidikan menengah Kota Semarang yaitu  $Y' = 91,600 + (-1,654)X$  dan persamaan APM pendidikan menengah Kota Semarang yaitu  $Y' = 70,444 + (-1,049)X$ . Berikut grafik tren angka partisipasi pendidikan menengah berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan sebagai berikut:



Gambar 8. Grafik Perhitungan Tren APK/APM Pendidikan Menengah Kota Semarang

Berdasarkan grafik di atas dapat diketahui bahwa prediksi APK dan APM mulai tahun 2020 mengalami penurunan setiap tahunnya. Garis tren APK dan APM mulai tahun 2020 disebut garis tren positif karena memiliki kecenderungan turun setiap tahunnya. Garis tren APK pendidikan menengah Kota Semarang menunjukkan mengalami penurunan sebesar 1,654% setiap tahunnya. Garis tren APM pendidikan menengah Kota Semarang menunjukkan mengalami penurunan sebesar 1,049% setiap tahunnya. Dibandingkan dengan target pemerintah yang disebutkan dalam pasal 2 ayat 2 Permen No 80 Tahun 2013 yaitu capaian APK pendidikan menengah pada tahun 2020 sebesar 97%, maka Kota Semarang dilihat dari hasil grafik tren sudah mencapai target pada tahun 2012 hingga tahun 2014. Akan tetapi, hasil tren APK APM Kota Semarang mulai tahun

2020 mengalami penurunan setiap tahunnya.

Hasil perhitungan tren APK APM Kota Semarang mengalami penurunan karena pada tahun 2014 ke 2015 mengalami penurunan. Tahun 2016 hingga tahun 2019 setiap tahunnya mulai mengalami kenaikan setiap tahunnya, tapi masih di bawah capaian pada tahun 2012 hingga 2014. Oleh karena itu, pemerintah harus menjaga kenaikan APK dan APM agar penurunan pada tahun 2014 ke 2015 tidak terulang kembali dan meningkatkan capaian APK dan APM agar tidak di bawah capaian nasional terus menerus.

### Tren Angka Partisipasi Pendidikan Menengah di Kabupaten Blora

Berdasarkan data dari Kemdikbud, dilakukan prediksi dengan mencari tren APK APM pendidikan menengah Kota Semarang dengan menggunakan analisis tren linier metode kuadrat terkecil dengan persamaan  $Y = a + bX$  dimana:

APK

$$a = \frac{\sum Y}{n} = \frac{780,49}{9} = 86,721$$

$$b = \frac{\sum XY}{\sum X^2} = \frac{182,09}{60} = 3,035$$

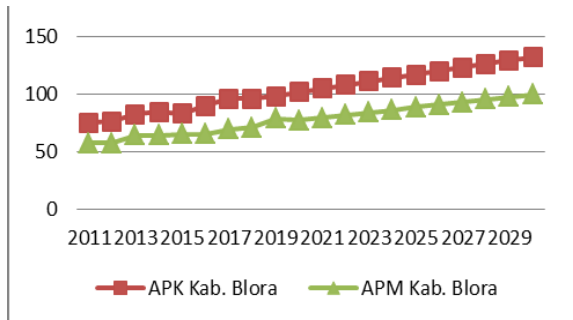
APM

$$a = \frac{\sum Y}{n} = \frac{592,16}{9} = 65,796$$

$$b = \frac{\sum XY}{\sum X^2} = \frac{136,12}{60} = 2,269$$

Berdasarkan perhitungan di atas, persamaan tren APK pendidikan menengah Kabupaten Blora yaitu  $Y' = 86,721 + 3,035X$  dan persamaan APM pendidikan menengah Kabupaten Blora yaitu  $Y' = 65,796 + 2,269X$ . Berikut grafik tren angka partisipasi

pendidikan menengah berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan sebagai berikut:



Gambar 9. Grafik perhitungan tren APK/APM Pendidikan Menengah Kab. Blora

Berdasarkan grafik di atas dapat diketahui bahwa prediksi APK dan APM mulai tahun 2020 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Garis tren APK dan APM mulai tahun 2020 disebut garis tren positif karena memiliki kecenderungan naik setiap tahunnya. Garis tren APK pendidikan menengah Kabupaten Blora menunjukkan mengalami peningkatan sebesar 3,035% setiap tahunnya. Sedangkan untuk garis tren APM pendidikan menengah Kabupaten Blora menunjukkan mengalami peningkatan sebesar 2,269% setiap tahunnya. Dibandingkan dengan target pemerintah yang disebutkan dalam pasal 2 ayat 2 Permen No 80 Tahun 2013 yaitu capaian APK pendidikan menengah pada tahun 2020 sebesar 97%, maka Kabupaten Blora dilihat dari hasil grafik tren akan mencapai target pada tahun 2020 sebesar 101,896% yang berarti menunjukkan bahwa telah mencapai target yang ditentukan. Capaian APM setiap tahunnya meningkat, hal ini menunjukkan bahwa anak yang mengenyam pendidikan menengah semakin sesuai dengan umur yang telah ditentukan yaitu 16 (enam belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun. Pada tahun 2028 APM pendidikan

menengah diprediksi mencapai 100,924%, hal ini menunjukkan bahwa anak-anak yang menempuh pendidikan menengah sudah sesuai dengan umur yang telah ditentukan.

Secara teoritis mengenai masalah dalam kebijakan pendidikan, pemerintah sebagai pembuat dan pelaksana kebijakan pendidikan selalu berusaha memberikan yang terbaik agar *over-supply* maupun *under-supply* tidak terjadi sehingga tercapai keseimbangan permintaan dan penawaran pendidikan. Capaian APK dan APM akan maksimal jika *supply* dan *demand* seimbang. Capaian APK/APM Pendidikan Menengah di Jawa Tengah masih di bawah capaian nasional karena masih banyak kabupaten/kota yang capaiannya di bawah capaian Provinsi. Hal itu disebabkan karena jumlah siswa yang bersekolah perjenjangnya pada tiap kabupaten/kota berbeda. Hal ini dapat menunjukkan bahwa belum terjadi keseimbangan antara *supply and demand*. Ketidakseimbangan pendidikan pada umumnya terjadi akibat sumber daya pendidikan yang sangat terbatas, perbedaan jenis pendidikan yang dibutuhkan antara harapan dan kenyataan (Soejota dkk : 2014). Oleh karena itu, agar partisipasi pendidikan menengah di Jawa Tengah dapat mencapai target yang telah ditentukan maka pemerintah sebagai penyedia layanan (*supply*) dan masyarakat sebagai pengguna (*demand*) saling bekerja sama sehingga mencapai keterseimbangan.

### **Kebijakan dan Program yang Diberlakukan oleh Pemerintah Jawa Tengah dalam Meningkatkan Angka Partisipasi Pendidikan Menengah**

Pemerintah Jawa Tengah telah membuat kebijakan dan program kegiatan untuk percepatan pencapaian APK/APM.

Friedrich dan Knoepfel (2007) berpendapat bahwa kebijakan merupakan rangkaian keputusan atau tindakan sebagai akibat dari interaksi terstruktur dan berulang berbagai aktor baik publik atau swasta yang terlibat dalam merespons, mengidentifikasi, dan memecahkan masalah yang secara politis didefinisikan sebagai publik. Dr. Abd Madjid (2008: 11) mengemukakan kebijakan pendidikan merupakan bagian dari kebijakan publik atau kebijakan pemerintah di bidang pendidikan yang didalamnya memuat perencanaan umum, jangka panjang, menengah dan pendek, serta langkah-langkah strategis yang harus dilakukan agar tujuan pendidikan tercapai. Pemerintah sebagai penyedia penawaran (*supply*) membuat kebijakan berdasarkan permasalahan yang ada di lapangan. Adapun kebijakan dan program dibagi menjadi beberapa aspek sebagai berikut:

1. Operasional kelembagaan meliputi Penyediaan Biaya Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BOP) dan Bantuan Operasioanl Daerah (BOSDA);
2. Personal siswa meliputi beasiswa miskin, pembiayaan studi lanjut bagi siswa miskin pada SMA Taruna Nusantara, bantuan seragam siswa kurang mampu;
3. Peningkatan akses meliputi pembangunan unit sekolah baru SMA/SMK Negeri, penyelenggaraan tiga SMK Negeri Boarding yang terletak di Semarang, Purbalingga, dan Pati, Pembangunan asrama siswa miskin pada 15 SMK Negeri (Semi Boarding), penyelenggaraan sekolah jarak jauh, dan Sekolah Virtual;
4. Peningkatan mutu meliputi peningkatan sarana dan prasarana

SMA/SMK/SLB baik melalui dana DAK maupun APBD.

### **Perencanaan Kebijakan yang dapat dilakukan Pemerintah Jawa Tengah**

Taufiqurokhman (2008: 2) mengatakan bahwa perencanaan merupakan cara berfikir persoalan-persoalan sosial dan ekonomi, yang berorientasi pada masa datang, berkembang dengan hubungan antara tujuan dan keputusan-keputusan kolektif dan mengusahakan kebijakan dan program. Rencana Kebijakan dan Program yang dilakukan Pemerintah Jawa Tengah sebagai berikut:

- a. Perencanaan Kebijakan atau Program Kegiatan dalam mempertahankan Partisipasi Pendidikan Menengah
  - 1) Kebijakan yang telah diberlakukan dalam operasioanal kelembagaan yaitu Penyediaan Biaya operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BOP) dan BOSDA.
  - 2) Kebijakan atau program kegiatan untuk personal siswa yaitu beasiswa miskin, pembiayaan studi lanjut siswa miskin ke SMA Taruna Nusantara, bantuan seragam siswa kurang mampu, serta penyelenggaraan sekolah jarak jauh dan sekolah virtual.
  - 3) Kebijakan atau program kegiatan untuk peningkatan akses yaitu pembangunan unit sekolah baru SMA/SMK Negeri, penyelenggaraan tiga SMK Negeri Boarding (khusus siswa miskin), serta pembangunan asrama siswa miskin di 15 SMK Negeri Semi Boarding.
  - 4) Kebijakan atau program kegiatan untuk peningkatan mutu yaitu peningkatan sarpras penunjang

pendidikan SMA/SMK/SLB Negeri.

Pemerintah Jateng dalam mempertahankan partisipasi pendidikan menengah membuat kebijakan beberapa bantuan agar masyarakat tidak merasa terbebani dengan biaya pendidikan karena berdasarkan Dokumen Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2023 rendahnya APK salah satunya disebabkan oleh faktor ekonomi. Pendidikan gratis pada sekolah menengah atas akan memberikan manfaat antara lain: (1) tumbuhnya angkatan muda baru yang berkualitas dan berdaya saing tinggi, (2) mengurangi angka kemiskinan yang cukup signifikan karena kemampuan berusaha dan bersaing lebih dapat diandalkan, (3) penggunaan APBN dan APBD akan bernilai manfaat yang berkepanjangan, (4) banyaknya kalangan siswa tidak mampu akan terbantu dengan baik sehingga mengurangi putus sekolah dan angka partisipasi akan meningkat, dan (5) menimbulkan kepedulian baru dari dunia usaha dan sector lain untuk pendidikan (Suyahman, 2016: 1052).

Untuk Kabupaten Temanggung, Kabupaten Jepara, Kabupaten Wonosobo, dan Kabupaten Blora yang hasil prediksi APK/APM meningkat maka perencanaan kebijakan atau program kegiatan yang akan dilakukan yaitu mempertahankan kebijakan dan program kegiatan yang telah dibuat agar angka partisipasi tidak menurun terutama pada aspek personal siswa dan peningkatan akses. Hal penting yang lain adalah peran serta masyarakat dalam mendukung kegiatan tersebut harus tetap dipertahankan karena itu sangat berpengaruh dengan terlaksananya kebijakan dan program kegiatan pemerintah.

b. Perencanaan Kebijakan atau Program Kegiatan dalam meningkatkan Partisipasi Pendidikan Menengah

Perencanaan kebijakan atau program kegiatan dalam peningkatan partisipasi dibuat khususnya untuk kabupaten/kota yang capaian APK/APM masih jauh dalam target PMU dan kabupaten/kota yang hasil perhitungan analisis tren turun dalam penelitian ini yaitu Kota Semarang dan Kota Surakarta. Rencana kebijakan atau program kegiatan untuk peningkatan partisipasi pendidikan menengah antara lain:

- 1) Pembangunan unit sekolah baru jika memang dibutuhkan untuk mempercepat pemerataan dan mengurangi jumlah anak putus sekolah
- 2) Mengoptimalkan kebijakan atau program kegiatan di daerah yang capaian APK/APM turun yaitu Kota Semarang dan Kota Surakarta
- 3) Sosialisasi kebijakan atau program kegiatan percepatan peningkatan partisipasi pendidikan menengah kepada masyarakat ditingkatkan
- 4) Sosialisasi beasiswa dalam pendidikan menengah kepada masyarakat
- 5) Melakukan pendekatan secara komprehensif sesuai dengan nilai budaya sesuai wilayah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pendidikan.

Kota Surakarta dan Kota Semarang yang diprediksi APK/APM kedepannya menurun maka akan dilakukan analisis terlebih dahulu penyebabnya. Jika penyebabnya mengenai ekonomi, maka kebijakan dan program yang ada akan lebih disosialisasikan agar masyarakat tahu dan paham bahwa Pemerintah telah memiliki beberapa kebijakan dan program kegiatan untuk mengupayakan masyarakat

tidak keberatan dalam masalah biaya pendidikan. Lalu, strategi lain yang akan dilakukan adalah sosialisasi agar kesadaran masyarakat dalam melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah lebih meningkat. Sosialisasi tentang melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi bertujuan untuk meningkatkan motivasi masyarakat dalam hal pendidikan. Pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan strata pendidikan, namun dapat meningkatkan keterampilan serta pengetahuan yang dimiliki berkembang. Pemaparan tentang manfaat dari menempuh pendidikan yang lebih tinggi diharapkan dapat memotivasi untuk melanjutkan sekolah. Orang tua dan siswa sama-sama diberikan sosialisasi agar keduanya memiliki kesadaran. Kegiatan sosialisasi sangat bermanfaat dalam memotivasi untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi (Thoharudin dkk, 2019: 6-9). Selanjutnya, meningkatkan peran serta masyarakatnya dalam mendukung kegiatan atau program Pemerintah Jawa Tengah dalam peningkatan partisipasi pendidikan menengah, karena jika kabupaten/kota capaiannya kecil maka akan berimbas pada target PMU di Jateng akan lebih lama dicapai. Pembangunan unit sekolah baru juga akan dilakukan jika memang daerah membutuhkan.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

Berikut dapat disimpulkan beberapa temuan hasil penelitian mengenai analisis Tren Angka Partisipasi Pendidikan Menengah dan Perencanaan Kebijakan Partisipasi Pendidikan di Provinsi Jawa Tengah:

1. APK Pendidikan Menengah di Jawa Tengah diprediksi dapat mencapai target PMU yaitu 97% pada tahun 2025 dengan prediksi mencapai 97,957%. APM Pendidikan Menengah di Provinsi Jawa Tengah diprediksi hingga tahun 2030 belum bisa mencapai 100%, tahun 2030 diprediksi mencapai 84,624%.
2. Berdasarkan hasil perhitungan analisis tren kabupaten/kota yang APK/APM meningkat yaitu BKabupaten Temanggung, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Blora, dan Kabupaten Jepara. Sedangkan Kota Surakarta dan Kota Semarang mengalami penurunan.
3. Kebijakan dalam meningkatkan APK/APM Pendidikan Menengah Jawa Tengah Pemerintah membagi kebijakan menjadi beberapa aspek yaitu operasional kelembagaan, peningkatan akses, personal siswa dan peningkatan mutu.
4. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Dinas Pendidikan Provinsi) dalam menindaklanjuti hasil tren maka membuat perencanaan kebijakan dan program kegiatan dengan cara mempertahankan partisipasi pendidikan menengah dan meningkatkan partisipasi pendidikan menengah.

### **Saran**

Berdasarkan temuan hasil penelitian yang dilakukan dengan kekurangan dan keterbatasan, maka penulis berusaha memberikan beberapa usulan saran sebagai berikut:

1. Meningkatkan APBD untuk intensif GTT/PTT
2. Menganalisis kabupaten/kota yang tingkat partisipasi pendidikan menengah rendah dan membuat kebijakan khusus untuk mempercepat



- peningkatan angka partisipasi pendidikan
3. Meningkatkan komunikasi dengan kabupaten/kota untuk monitoring keadaan pendidikan menengah di setiap kabupaten/kota
  4. Memperhatikan sekolah swasta dengan pendapatan kecil agar dapat menampung anak usia pendidikan menengah dengan maksimal
  5. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai kebijakan dan program kegiatan yang ada di Provinsi Jawa Tengah.
  6. Peneliti selanjutnya dapat mengembangkan penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat dalam partisipasi pendidikan menengah di Kabupaten/kota agar lebih spesifik

## DAFTAR PUSTAKA

- BPS. (2020). *APK APM*. Diakses tanggal 7 Maret 2020 pada <https://www.bps.go.id/subject/28/pendidikan.html>
- BPS Jawa Tengah. (2020). *Provinsi Jawa Tengah Dalam Angka 2020*. Semarang: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. <https://jateng.bps.go.id/publication/2020/04/27/b96a0d5f63de624aa600934d/provinsi-jawa-tengah-dalam-angka-2020.html>
- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah. (2019). *Renstra Disdikbud Jateng 2018-2023*. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Hitasari, K., Safitri, D., & Suparti. (2015). "Pengelompokan Kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan Angka Partisipasi Pendidikan Jenjang SMA/MA/Paket C Dengan Fuzzy Subtractive Clustering". *Jurnal Gaussian*, 4(4), 967–975. Retrieved from <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/gaussian/article/view/10232/9934>
- Humas Jateng. (2020). *SPP Gratis Mulai Januari, Terlanjur Bayar Akan Dikembalikan*. Diakses pada 7 Maret 2021 dari <https://jatengprov.go.id/publik/spp-gratis-mulai-januari-terlanjur-bayar-akan-dikembalikan/>.
- Kemdikbud. (2020). *APK APM Sekolah*. Diakses tanggal 7 Maret 2020 pada <http://apkapm.data.kemdikbud.go.id/>
- Kemdikbud. (2013). *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2013 tentang Pendidikan Menengah Universal*.
- Soejoto, A., Rachmawati, L., & Dewi, R. M. (2014). Pengaruh Permintaan terhadap Outcome Sekolah Menengah Atas di Kota Surabaya. *Jurnal Ekonomi Pendidikan Dan Kewirausahaan*, 2(1), 17–28. [https://www.researchgate.net/publication/315643181\\_PENGARUH\\_PERMINTAAN\\_TERHADAP\\_OUTCOME\\_SEKOLAH\\_MENENGAH\\_ATAS\\_DI\\_KOTA\\_SURABAYA](https://www.researchgate.net/publication/315643181_PENGARUH_PERMINTAAN_TERHADAP_OUTCOME_SEKOLAH_MENENGAH_ATAS_DI_KOTA_SURABAYA)
- Subarsono. (2012). *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suyahman. (2016). Analisis Kebijakan Pendidikan Gratis Di Sekolah Menengah Atas. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaran*, 6, 1047–1054. <https://ppjp.ulm.ac.id/journal/index.php/pkn/article/view/2429>
- Thoharudin, M., Suryanti, Y., & Sore, A.

D. (2019). Sosialisasi Pentingnya Pendidikan Lebih Tinggi Di Desa Sungai Mali Kecamatan Ketungau Hilir. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Khatulistiwa*, 2(1), 1–9. <https://doi.org/10.31932/jpmk.v2i1.42>

3

William N. Dunn. (2003). *PENGANTAR ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK*. Yogyakarta: PT Gadjah Mada University Press.